

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan Indonesia terhadap *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) dalam konteks pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta dampaknya terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat lokal. Dengan menggunakan pendekatan *Human Rights-Based Approach* (HRBA) dalam pembangunan, penelitian ini menyoroti bagaimana tingkat kepatuhan Indonesia dalam pembangunan Mandalika dan penyebab rendahnya tingkat kepatuhan tersebut. Meskipun proyek ini diklaim bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan citra pariwisata Indonesia di tingkat global, kenyataannya proyek ini justru menciptakan pelanggaran HAM, khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif melalui studi literatur dan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pembangunan KEK Mandalika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Indonesia terhadap ICESCR tergolong rendah, yang tercermin dari upaya pemerintah sebagai *duty-bearer* yang melegitimasi pelanggaran dan pengabaian hak masyarakat melalui kebijakan atas nama pembangunan, serta keterlibatan pihak asing dalam mendukung upaya melalui investasi. Selain itu, upaya pembangunan yang dilakukan sering kali bertentangan dengan nilai-nilai HAM, dengan minimnya upaya untuk meningkatkan kesadaran bahwa pemenuhan hak dalam pembangunan menjadi tanggung jawab semua pihak. Meskipun terdapat inisiatif untuk mencegah dampak negatif pembangunan melalui penyusunan jaminan sosial dan lingkungan serta pelaksanaan konsultasi publik, implementasi kebijakan tersebut sering kali tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga mendorong pelanggaran HAM yang lebih luas. Rendahnya kepatuhan Indonesia dalam pembangunan KEK Mandalika ini disebabkan oleh fokus pemerintah yang lebih mementingkan peningkatan ekonomi dan pembangunan melalui investasi dan citra pariwisata sehingga aspek HAM diabaikan dan marginalisasi masyarakat lokal.

**Kata Kunci:** ICESCR, KEK Mandalika, HAM, masyarakat lokal

## **ABSTRACT**

*This research analyzes Indonesia's level of compliance with the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) in the context of Mandalika Special Economic Zone (SEZ) development and its impact on the human rights of local communities. Using the Human Rights-Based Approach (HRBA) on development, this research highlights Indonesia's level of compliance through Mandalika development and the reasons behind it. Although the project aims to boost Indonesia's economic growth and tourism image globally, in reality, it has caused human rights violations, especially in the economic, social, and cultural aspects. This research uses a qualitative method with descriptive analysis through literature studies and interviews with various parties directly involved in the development of Mandalika SEZ. The results show that Indonesia's level of compliance with the ICESCR is low, which is reflected in the government's efforts as a duty-bearer who legitimizes violations and neglect of community rights through policies in the name of development, as well as the involvement of foreign parties in supporting efforts through investment. In addition, development efforts often conflict with human rights values, with minimal efforts to raise awareness that the fulfillment of rights in development is the responsibility of all parties. While there are initiatives to prevent the negative impacts of development through the development of social and environmental guarantees and the conduct of public consultations, the implementation of these policies is often different than planned, leading to broader human rights violations. Finally, the research concluded that Indonesia's lack of compliance in the development of Mandalika SEZ is due to the government's focus and priority on improving the economy and development through investment and tourism image, resulting in the neglect of the human rights and marginalization of the local community.*

**Keywords:** *ICESCR, Mandalika SEZ, human rights, local communities*